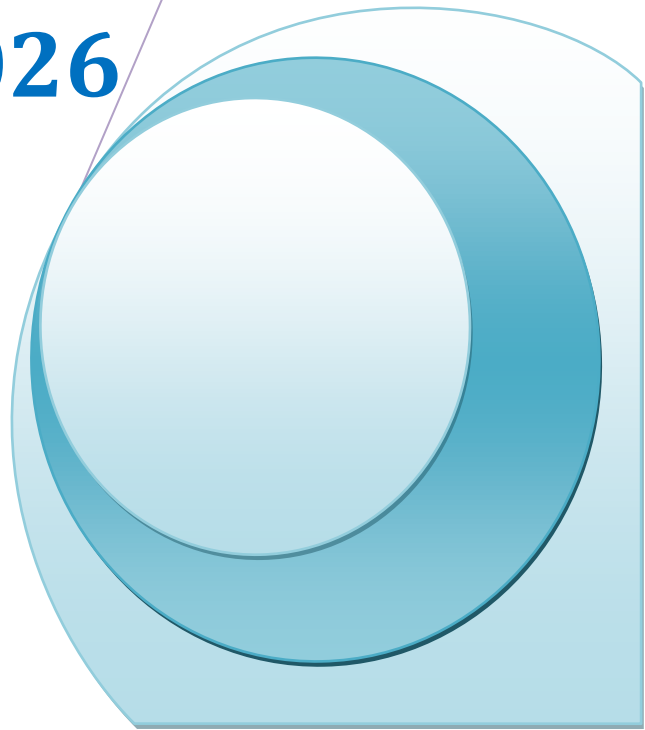


RENJA TAHUN 2026

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

KABUPATEN LUWU TIMUR



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja (RENJA) ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan RENJA di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunannya.

Malili, 10 Juli 2025

KEPALA PELAKSANA,

Dr. April M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670707 200012 1 002

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
	1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
	2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	43
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	43
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	67
	3.3 Program dan Kegiatan.....	68
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	102
BAB V	PENUTUP.....	109

DAFTAR TABEL T-C

Tabel 1. TC.29 :	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2026	11
Tabel 2. TC.30 :	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
Tabel 3. TC.31 :	Review/Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	31
Tabel 4. TC.32 :	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026.....	42
Tabel 5	: Highlight Indikasi Intervensi di Kabupaten Luwu Timur.....	52
Tabel 6	: Kualitas Pelayanan Public, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, dan Kualitas Ketahanan Desa, dengan Prioritas Pembangunan	55
Tabel 7	: Keselarasan dan Keterkaitan dengan Prioritas Nasional (PN) dan Provinsi Sulawesi Selatan	56
Tabe 8	: Konsistensi dengan Permasalahan/Isu Strategis.....	63
Tabel 9	: Keterkaitan Isi Strategis, Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2026	65
Tabel 10	: Tujuan Sasaran Renja BPBD tahun 2026	67
Tabel 11. TC.33:	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	71
Tabel 12	: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Air Tahapan Penyusunan Renja OPD	3
Gambar 2 : Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045	45
Gambar 3 : 17(Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan	45
Gambar 4 : Visi PB Dalam RIPB 2020-2044	47
Gambar 5 : Kebijakan PB Tahun 2020-2044	49
Gambar 6 : Tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 tujuan Negara adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum” sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak – hak dasar, termasuk perlindungan dan hak – hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman dan resiko bencana.

Terkait dengan penanggulangan bencana kemudian diterbitkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana disebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana adalah Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta. Kemudian tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pendirian BPBD sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bencana alam di Kabupaten khususnya Kabupaten Luwu Timur. Dalam melaksanakan pengelolaan bencana tersebut diperlukan adanya perencanaan dan penganggaran yang optimal. Perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja disusun sesuai usulan program dan kegiatan yang didukung dengan data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang menjadi perhatian antara lain :

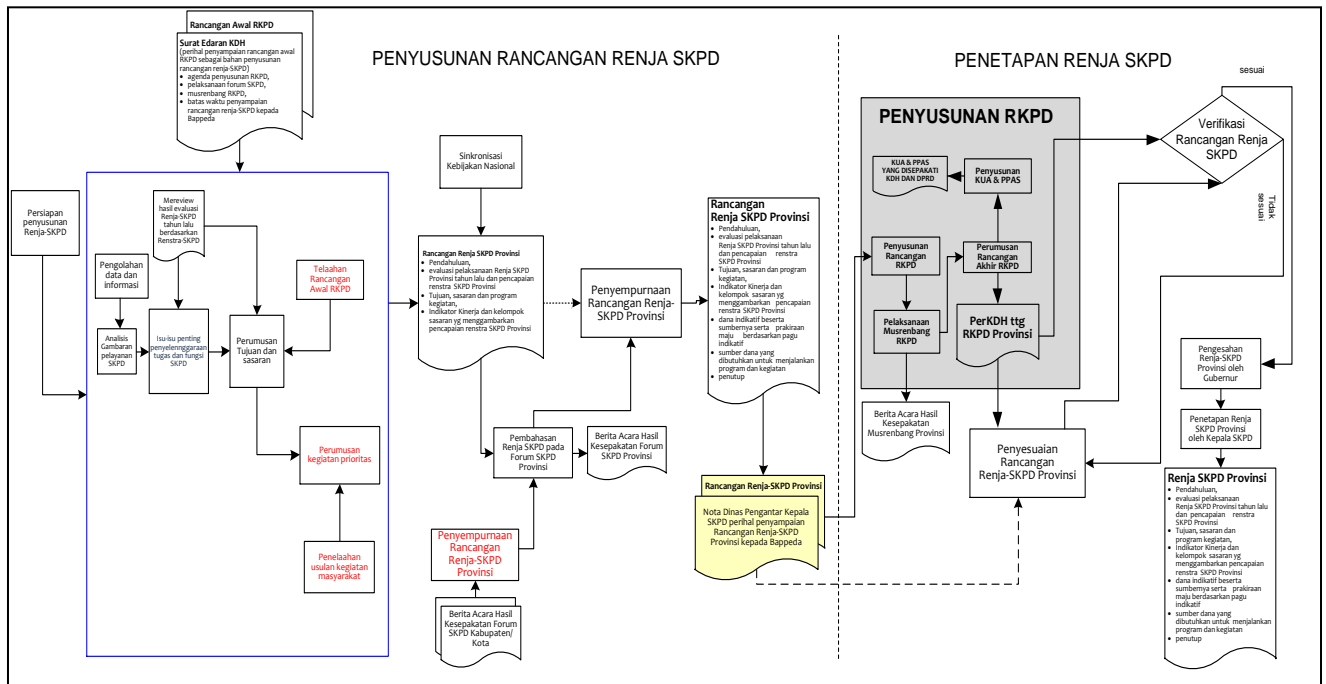
1. Program dalam Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sebagai Dokumen Rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2026.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Gambar 1: Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD

Rencana Kerja BPBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tentunya diperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu BPBD harus mampu mengambil peran secara optimal, utamanya di dalam penganggulangan bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Rencana Kerja BPBD guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana telah dijabarkan kedalam Renstra BPBD 2021-2026.

Peran dan fungsi Renstra sangat penting dalam penetapan Rencana Kerja tahunan. Rencana Kerja harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan

disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP 87/N.PPN/HK/10/2024 tentang Penetapan meta data indikator Sustainable Development Goals (SDGs);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 341);

29. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 ini adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedalam program/kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pencegahan, penanggulangan bencana , kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2026 dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana penanggulangan bencana.
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD di dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. Mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien.
4. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini memuat tentang gambaran umum, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026.
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran renstra serta program dan kegiatan yang direncanakan.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang rencana kerja yang telah dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan serta pendanaan yang dibutuhkan.
- BAB V PENUTUP**, Bab ini memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2026 diperlukan evaluasi capaian tahun sebelumnya. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 s.d Tahun berjalan(*) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL.1 (TC.29)
 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
 PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2026
 KABUPATEN LUWU TIMUR

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022(tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)		Catatan				
					Target Renja SKPD 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025 (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4					
1	WAJIB														
1	05	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA													
1	05	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	106,25 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	102 %	102 %		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	13 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	2 Dokumen	11 Dokumen	85 %	

1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	12 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	2 Dokumen	11 Dokumen	92 %	
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	12 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	2 Dokumen	11 Dokumen	92 %	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	60 Dokumen	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00 %	10 Dokumen	50 Dokumen	83 %	
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	91,01 %	100 %	96,87 %	96,87 %	100 %	95,96 %	95,96 %	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	120 Orang	41 Orang	16 Orang	15 Orang	93,75 %	16 Orang	72 Orang	60 %	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	108 Dokumen	54 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100,00 %	18 Dokumen	90 Dokumen	83 %	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	- Dokumen	0 %	
1	05	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Dokumen)	8 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	- Dokumen	0 %	

1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	24 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %	4 Dokumen	20 Dokumen	83 %
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	- Dokumen	0 %
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	125 %	100 %	80 %	80,00 %	100 %	102 %	102 %
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	105 stel	18 stel	0 stel	0 stel	#DIV/0! %	0 stel	18 stel	17 %
1	05	02	01	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	83 Orang	58 Orang	15 Orang	12 Orang	80,00 %	10 Orang	80 Orang	96 %
1	05	02	01	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0! %	0 Laporan	- Laporan	0 %
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	101,29 %	100 %	99,16 %	99,16 %	100 %	100,2 %	100,2 %
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	120 jenis	59 jenis	20 jenis	19 jenis	95,00 %	20 jenis	98 jenis	82 %

1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	1625 orang	892 Orang	275 Orang	275 Orang	100,00 %	330 Orang	1.497 Orang	92 %	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	48 jenis	24 jenis	8 jenis	8 jenis	100,00 %	8 jenis	40 jenis	83 %	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	360 eksp	180 eksp	60 eksp	60 eksp	100,00 %	60 eksp	300 eksp	83 %	
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	- Dokumen	0 %	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	18 jenis	9 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00 %	3 jenis	15 jenis	83 %	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	353 kali	211 kali	60 kali	60 kali	100,00 %	41 kali	312 kali	88 %	
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	80,4 %	100 %	68,75 %	68,75 %	100 %	125 %	124,58 %	
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00 %	1 Unit	2 Unit	200 %	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	91 unit	24 unit	4 unit	3 unit	75,00 %	4 unit	31 unit	34 %	

1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	8 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100,00 %	3 unit	9 unit	113 %	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	27 unit	10 unit	6 unit	0 unit	0,00 %	4 unit	14 unit	52 %	
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	100,00 %	0 unit	4 unit	400 %	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	- unit	0 %	
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	- unit	0 %	
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	106,16 %	100 %	106,5 %	106,50 %	100,00 %	104 %	104,22 %	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	2400 Surat	1507 surat	400 surat	466 surat	116,50 %	400 surat	2.373 surat	99 %	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	12 orang	6 Orang	2 Orang	2 Orang	100,00 %	2 Orang	10 Orang	83 %	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	216 rekening	108 rekening	36 rekening	37 rekening	102,78 %	36 rekening	181 rekening	84 %	

1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	103 %	100 %	102,67 %	102,67 %	100 %	102 %	101,89 %	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	15 unit	13 unit	13 unit	13 unit	100,00 %	13 unit	13 unit	87 %	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 unit	6 unit	2 unit	2 unit	100,00 %	2 unit	10 unit	83 %	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	110 unit	149 unit	25 unit	34 unit	136,00 %	25 unit	208 unit	189 %	
1	05	02	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	05	02	05	06	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	91,46 %	100 %	91,46 %	91,46 %	100 %	94,31 %	94,31 %	
						2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	
						(3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	

1	05	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,75 %	0,263 %	0,08 %	0,08 %	100,00 %	0,08 %	0,423 %	56,40 %
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal (dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	0,00 Dokumen	2 Dokumen	200 %
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	2250 orang	792 Orang	250 Orang	250 Orang	100,00 %	250 Orang	1.292 Orang	57,42 %
1	05	03	2.02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	21,8 %	5,1 %	2,656 %	2,656 %	100,00 %	4,36 %	12,12 %	55,58 %
						Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	300 Orang	127 Orang	50 Orang	43 Orang	86,00 %	50 Orang	220 Orang	73,33 %
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	1175 orang	256 orang	50 orang	50 orang	100,00 %	100 orang	406 orang	34,55 %
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	5 dokumen	83 %
						Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	5 dokumen	83 %

1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal (dok)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	0 dokumen	2 dokumen	200 %
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	2700 orang	1346 unit	250 Orang	250 Orang	100,00 %	250 orang	1.846 Orang	68 %
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk (Desa)	20 Desa	8 desa	4 desa	4 desa	100,00 %	4 desa	16 desa	80 %
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal (dokumen)	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00 %	0 dokumen	1 dokumen	50 %
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	136 unit	88 unit	21 unit	21 unit	100,00 %	77 unit	186 unit	137 %
1	05	03	2.03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %

1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.05	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi (Lembaga)	1 Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100,00 %	1 lembaga	1 lembaga	100 %
1	05	03	2.05	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota yang disusun (Dokumen)	9 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00 %	3 Dokumen	12 dokumen	133 %

1	05	03	2.05	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang disusun	16 Reko mend asi	0 Reko mend asi	0 Reko mend asi	0 Reko mend asi	#DIV/0! %	0 Rekome ndasi	- Reko mend asi	0 %
1	05	03	2.05	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan (unit)	7 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0! %	0 Unit	- Unit	0 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan capaian program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagai berikut :

❖ **Realisasi Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Realisasi kinerjanya tidak mencapai target karena adanya beberapa jabatan yang masih kosong ASNnya akibat adanya mutase pegawai

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Realisasi kinerja tidak mencapai target karena pengadaan pakaian dinas disesuaikan dengan kebijakan yang bersifat umum untuk semua OPD

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin

Realisasi kinerja tidak mencapai target karena jumlah peralatan yang direncanakan dalam Renja tidak semuanya terakomodir di APBD, disesuaikan dengan kemampuan daerah serta pertimbangan kebutuhan penting mendesak untuk diadakan.

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Realisasi kinerja tidak mencapai target karena direncanakan pengadaan CCTV pada tahun 2023 namun ditunda pelaksanaannya dengan pertimbangan kondisi kantor yang sangat luas dan terbuka sehingga tidak mencukupi kebutuhan.

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Realisasi kinerja tidak mencapai target karena jumlah peralatan yang direncanakan dalam Renja tidak semuanya terakomodir di APBD, disesuaikan dengan kemampuan daerah serta pertimbangan kebutuhan penting mendesak untuk diadakan

- Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Realisasi kinerja tidak mencapai target karena adanya refocusing anggaran akibat covid-19 sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Motor Dinas)
Pengadaan motor tersebut tidak dilaksanakan karena adanya bantuan kendaraan dinas operasional dari BNPB sehingga dilakukan efisiensi anggaran.
2. Program Penanggulangan Bencana
- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)
Realisasi kinerja tidak sesuai target Renstra karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - b. Kegiatan Pelayanan, Pencegahan & Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota
Realisasi kinerja tidak sesuai target Renstra karena adanya beberapa orang TRC yang mengajukan Resign sehingga jumlah yang mengikuti pelatihan berkurang.
 - Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Realisasi kinerja tidak sesuai target Renstra karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi
Realisasi kinerja tidak sesuai target Renstra karena pada tahun 2023, penyusunan Renkon Longsor tidak terealisasi akibat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana aksi.

- ❖ Realisasi Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 8. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 9. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

10. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- ❖ Realisasi Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ❖ Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja
Adapun Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah :
 1. Keterlambatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
 2. Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai dengan rencana aksi dan anggaran kas
 3. Keterlambatan PPTK melaksanakan kegiatan
 4. Keterbatasan personil dan anggaran
 5. Penentuan target yang tidak tepat
- ❖ Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja
Adapun faktor penyebab terpenuhinya kinerja atau keberhasilan adalah :
 1. Perhitungan kebutuhan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
 2. Perbaikan target pada saat perubahan renja
 3. Adanya crosscutting antar OPD
- ❖ Faktor-faktor penyebab melebihinya target kinerja
Faktor penyebab realisasi kinerja melebihi target adalah :
 1. Terdapat sub kegiatan yang anggarannya bisa membiayai lebih dari target yang direncanakan
 2. Bisa saja penetapan target yang tidak tepat

- ❖ Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah :
 1. Penetapan target yang tidak tepat mengakibatkan capaian Renstra OPD tidak sesuai perencanaan
 2. Terjadi ketimpangan antara target dan realisasi (kinerja dan keuangan) pada saat penyusunan evaluasi Renstra (Form E-80).
- ❖ Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut adalah :
 1. Melakukan koordinasi lintas OPD terkait (Crosscutting program dan kegiatan) yang memungkinkan tercapainya target kinerja sesuai Renstra misalnya dengan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinsos &P3A, Dinas PUPR, Perkimtan, Dinas Damkar & Penyelamatan, Dinas PMD, Dinas Perhubungan untuk pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana
 2. Melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Dunia Usaha yang memungkinkan untuk pencapaian kinerja SPM misalnya dengan PT. Vale Indonesia, TNI/POLRI, BASARNAS, BASNAZ dsb.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dipimpin oleh seorang *ex officio* adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien

- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	-	0,45	0,46	0,48	0,50	0,60	0,65	0,66	0,66	
2		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	-	100%	100%	100%	100%	91,46%	100%	100%	100%	
3		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2025 antara lain :

1. Berdasarkan data kejadian bencana s.d Juni Tahun 2025, jumlah kejadian bencana yang terjadi sebanyak 435 kejadian yang terdiri dari Kebakaran 6 kejadian (Kebakaran Hutan dan Lahan 0 Kejadian dan Kebakaran rumah/ruko/gudang/hotel/pasar 6 Kejadian), Cuaca Ekstrim 15 Kejadian, Banjir 13 Kejadian, Tanah Longsor 8 Kejadian, Orang Hilang/Tenggelam 4 Kejadian dan Gempa Bumi 389 kejadian. Dan perlu menjadi perhatian yaitu adanya Sesar Matano serta keberadaan 3 Dam Seri Larona. Olehnya itu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi kejadian bencana tersebut.
2. Terdapat 3 (tiga) bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dibangun seri pada DAS Larona, aktifitas operasional dam mempengaruhi debit air sungai Larona yang selalu naik dan menggenangi areal persawahan, perkebunan dan pemukiman masyarakat. Kegagalan pada salah satu dam menjadi ancaman yang dapat menyebabkan bencana besar. Kondisi ini memerlukan upaya pencegahan untuk mengurangi resiko bencana yang melibatkan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat yang akan terkena dampak.
3. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam gempa bumi, banjir dan tanah longsor
4. Potensi Bencana Hidrometeorologi Basah (Banjir, curah hujan ekstrem, angin kencang dan puting beliung) yang terjadi pada bulan November dan Desember 2024 s.d Februari 2025 dan Kering (kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan kualitas udara buruk). Dimana wilayah Sulawesi Selatan didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah. Dan berdasarkan informasi BMKG bahwa Wilayah Sul-Sel diprediksi akan mengalami musim hujan hingga bulan Juni 2025. Olehnya perlu untuk meningkatkan kesiapsiagaan, salah satunya dengan kesiapsiagaan personel dan logistik
5. Daerah rawan bencana (Penanganan Mitigasi Daerah Rawan Bencana)
6. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis;
7. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

8. Luasnya cakupan wilayah penanganan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personel serta peralatan yang tersedia;
9. Masih lemahnya koordinasi antar instansi di tingkat pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, badan usaha, LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
10. Pelaksanaan SPM serta ketentuan umum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang didalam isinya mengharuskan jenis dan mutu pelayanan dasar sebagai urusan wajib daerah serta berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

1.3.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Pengintegrasian Dokumen Kajian Risiko Bencana dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen RTRW
- b. Melakukan kajian resiko bencana pada daerah yang berpotensi bencana sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan penanggulangan bencana dan memulihkan kondisi yang rusak akibat bencana.
- c. Segera menyusun Rencana Kontijensi Banjir Bandang dan Longsor (mengesahkan, mensosialisasikan, dan menguji dalam geladi/simulas)
- d. Memetakan fasilitas umum penting di area rawan bencana; Sekolah, fasilitas kesehatan, Desa
- e. Melakukan upaya peringatan dini terhadap bencana yang mungkin dapat terjadi pada daerah-daerah rawan bencana.
- f. Meningkatkan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan tentang kebencanaan dan penanggulangan bencana.
- g. Mengalokasikan minimal 1% APBD untuk Pengurangan Risiko Bencana (Pencegahan, Mitigasi, kesiapsiagaan dan EWS) dapat melekat pada OPD strategis tidak hanya di BPBD
- h. Mengalokasikan 0.5% APBD untuk Belanja Tidak Terduga khusus bencana
- i. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam penanggulangan bencana.
- j. Menyediakan sarana dan prasana penanggulangan yang memadai.

- k. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
- l. Menindaklanjuti Rencana Tanggap Darurat PT. Vale Indonesia Tbk. Terkait penanganan Dam Larona.
- m. Mempersiapkan data terkait kebutuhan logistik dan stok ketersediaan pangan pada OPD terkait untuk mengantisipasi jika terjadi bencana.
- n. Mempersiapkan data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD terkait maupun dunia usaha dalam mengantisipasi kejadian bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang. Selain itu, review ini juga didasari atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sehingga membutuhkan penyesuaian sebagai upaya sinergitas. Pada proses perjalanannya, beberapa rancangan awal mengalami perubahan dan perbaikan sesuai kebutuhan, ketersediaan dan efisiensi anggaran serta efektifitas suatu program dalam pelaksanaannya. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Luwu Timur

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA OPERASI				5.172.606.050	BELANJA OPERASI				5.172.606.050	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur	100%	4.037.690.550	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur	100%	4.037.690.550	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur	100%	111.510.300	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur	100%	111.510.300	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	33.083.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	33.083.700	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	4.690.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	4.690.500	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	4.332.700	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	4.332.700	

4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	10 Laporan	69.403.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	10 Laporan	69.403.400	
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur	100%	2.928.381.066	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur	100%	2.928.381.066	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	22 Orang	2.873.307.966	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	22 Orang	2.873.307.966	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	18 Laporan	55.073.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	18 Laporan	55.073.100	
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	21.360.100	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		100%	21.360.100	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	4 Laporan	21.360.100	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	4 Laporan	21.360.100	
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	100%	80.701.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	100%	80.701.000	
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	43 Paket	36.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	43 Paket	36.200.000	

9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	10 orang	44.501.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	10 orang	44.501.000	
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	100%	389.775.600	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	100%	389.775.600	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	8 Paket	14.213.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	8 Paket	14.213.000	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	20 Paket	31.240.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	20 Paket	31.240.000	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	3 Paket	34.085.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	3 Paket	34.085.000	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	60 Dokumen	7.440.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	60 Dokumen	7.440.000	
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Laporan	15.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Laporan	15.400.000	

15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Laporan	287.397.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Laporan	287.397.600	
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur	100%	142.610.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur	100%	142.610.000	
16	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	15 Unit	33.850.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	15 Unit	33.850.000	
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	7 unit	84.760.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	7 unit	84.760.000	
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	4 unit	24.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	4 unit	24.000.000	
VIII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur	100%	97.782.484	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur	100%	97.782.484	
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Laporan	4.415.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Laporan	4.415.800	
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Laporan	67.806.684	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Laporan	67.806.684	

21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Laporan	25.560.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Laporan	25.560.000	
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur	100%	265.570.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur	100%	265.570.000	
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	14 unit	127.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	14 unit	127.000.000	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	34 unit	28.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	34 unit	28.750.000	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	3 unit	109.820.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	3 unit	109.820.000	
B	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	100%	1.134.915.500	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	100%	1.134.915.500	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%		
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender		100%			Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender		100%		

IX	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	0,08%	37.422.400	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	0,08%	37.422.400	
25	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	250 org	37.422.400	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	250 org	37.422.400	
X	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur	100%	480.512.100	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur	100%	480.512.100	
26	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	75 Unit	30.750.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	75 Unit	30.750.000	
27	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	50 Keluarga	16.611.500	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	50 Keluarga	16.611.500	
28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Kawasan	47.480.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Kawasan	47.480.000	

29	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Laporan	16.849.500	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Laporan	16.849.500	
30	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	4 Kawasan	59.433.900	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	4 Kawasan	59.433.900	
31	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kec/Desa	50 orang	43.751.500	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kec/Desa	50 orang	43.751.500	
32	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen	56.042.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen	56.042.000	
33	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	182.262.200	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	182.262.200	
34	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	250 org	27.331.500	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	250 org	27.331.500	

XI	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur	100%	411.986.800	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur	100%	411.986.800	
35	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Laporan	22.041.200	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Laporan	22.041.200	
36	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Dokumen	231.203.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Dokumen	231.203.000	
37	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	750 orang	38.525.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	750 orang	38.525.000	
38	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen	24.822.700	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen	24.822.700	
39	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	750 orang	52.908.700	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	750 orang	52.908.700	
40	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Laporan	20.445.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Laporan	20.445.000	

41	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Dokumen	22.041.200	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Dokumen	22.041.200	
XII	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	Kab. Luwu Timur	5,45 %	204.994.200	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	Kab. Luwu Timur	5,45 %	204.994.200	
42	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	3 Dokumen	16.126.200	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	3 Dokumen	16.126.200	
43	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen	20.000.000	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen	20.000.000	
	44	Bimbingan teknis pasca bencana kabupaten/kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	25 Orang	29.995.500	Bimbingan teknis pasca bencana kabupaten/kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	25 Orang	29.995.500
45	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Kegiatan	49.822.300	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Dokumen	49.822.300	

46	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Lembaga	19.995.700	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Lembaga	19.995.700	
47	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kab/kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Laporan	19.996.000	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kab/kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	1 Laporan	19.996.000	
48	Penyusunan kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kab/kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen	49.058.500	Penyusunan kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kab/kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen	49.058.500	
JUMLAH TOTAL					5.172.606.050	JUMLAH TOTAL					5.172.606.050

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat tentang kebijakan. program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Usulan program dan kegiatan berasal dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Perusahaan/ Instansi Swasta, yang merupakan hasil dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Kabupaten. Hasil musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2025 yang nantinya digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil pencermatan usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan kerja. Kemudian rancangan renja tersebut dibahas dalam forum SKPD. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah penyesuaian program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif. Dan pada pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, tidak terdapat usulan dari pemangku kepentingan.

Tabel. 4 (T-C.32)
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Luwu Timur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana

Arah kebijakan nasional penanggulangan bencana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 beserta peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 serta Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008.

Landasan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan asas penanggulangan bencana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yaitu

1. Keadilan
2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
3. Keseimbangan
4. Ketertiban dan kepastian hukum
5. Kebersamaan
6. Kelestarian lingkungan hidup
7. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, yaitu cepat dan tepat, prioritas, kordinasi dan keterpaduan, berdaya dan hasil guna, transparansi dan akuntalibitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif dan nonproseliti yaitu dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

3.1.2 RPJPN (2025-2045)

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diwujudkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional.

Penyusunan RPJP Nasional Tahun 2025—2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Bernegara Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu **Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur**. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan merupakan cita-cita yang menggema di pikiran dan relung hati seluruh bangsa. Dalam mewujudkan Visi pembangunan di masa depan yang gemilang, berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Indonesia mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sektor maritim, dan keberlanjutan Pembangunan.

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah:

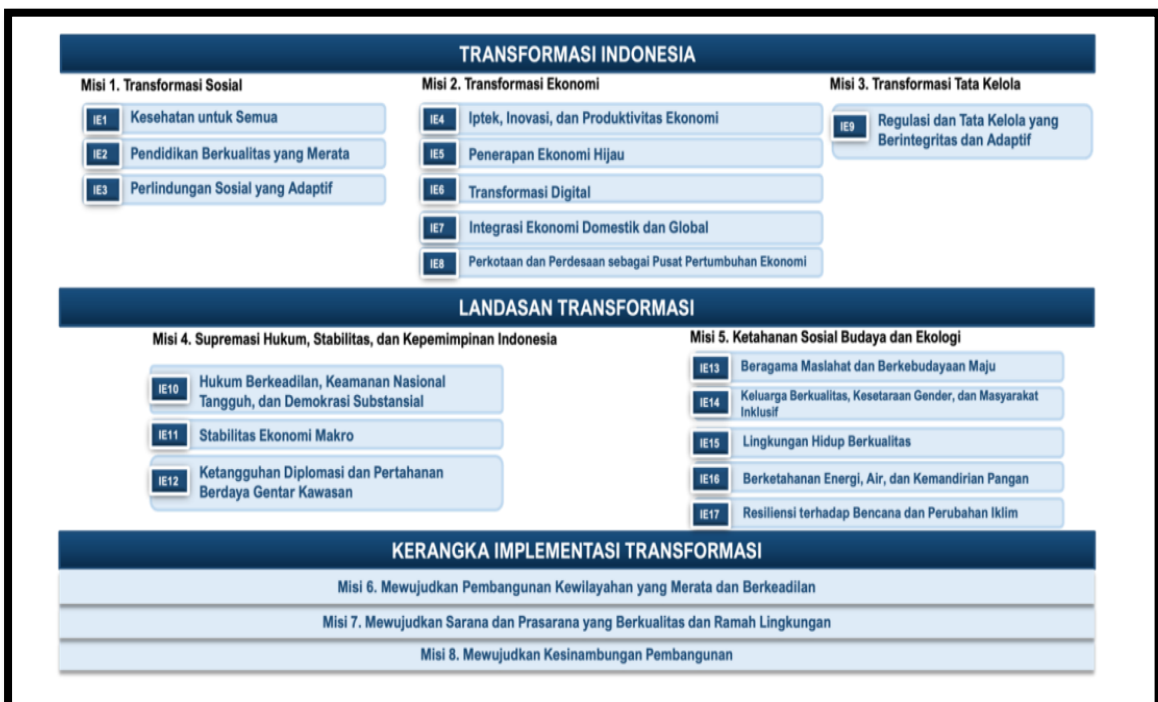
1. pendapatan per kapita setara negara maju,
2. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang,
3. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat,
4. daya saing sumber daya manusia meningkat,
5. dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi (agenda) pembangunan. Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama transformasi meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang merupakan 3 (tiga) misi (agenda) pembangunan yang tercakup dalam kelompok pertama, yaitu kelompok transformasi. Adapun 8 Misi (agenda) Pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar. 2 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045



Gambar. 3. 17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan



Terkait Misi Ke-5 yaitu **Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**, maka Penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah.

Arah kebijakannya meliputi:

1. Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah pulau untuk penyusunan profil risiko dan program mitigasi bencana;
2. Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tataruang wilayah di setiap tingkatan;
3. Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif klaster logistik penanggulangan bencana dan kemitraan sektor publik dan swasta (*public-private partnerships*);
4. Pembangunan *grey infrastructure* (*sea wall, breakwater, spillway, dll*) dan *nature-based solution* (pembangunan *green belt*) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut;
5. Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi;
6. Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu keluarga, dan komunitas;
7. Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level pendidikan dasar dan menengah;
8. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana;
9. Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana); serta
10. Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

3.1.2 RIPB (2020-2044)

Berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2020 mengatur tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044. RIPB merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan PB yang berlaku selama 25 tahun dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu RIPB 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka PBB untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015-2030

Gambar. 4





MISI PB DALAM RIPB 2020-2044

1. Mewujudkan **penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.**
2. Mewujudkan **tata kelola penanggulangan bencana yang professional dan inklusif.**
3. Mewujudkan **penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.**



TUJUAN RIPB 2020-2044

"meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang"

SASARAN RIPB 2020-2044

1. Kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat & keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam PB.
2. Peningkatan investasi kesiapsiagaan & pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko bencana.
3. Peningkatan kualitas tata kelola PB yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Penanganan darurat bencana yang cepat & andal.
5. Pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik & aman.

Gambar 5



3.1.2.1 Fokus Capaian RIPB Periode II (2025-2029)

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB.
2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.
3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.

5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.
10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.

3.1.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2026 adalah **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas, serta untuk mencapai target sasaran Pembangunan tahun 2026, ditetapkan 8 (delapan) prioritas nasional sebagai berikut :

Gambar 6. Prioritas Nasional



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024

Tabel 5.
Highlight Indikasi Intervensi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026
Berdasarkan RKP Tahun 2026

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
Kawasan Perkotaan Kecil (Sorowako)	- Peningkatan Layanan Konektivitas transportasi
	- Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
	- Pembinaan dan Pengawasan pengembangan sanitasi
	- Penguatan kapasitas daerah dalam manajemen layanan SPALD dan pengelolaan lumpur tinja terjadwal (LLTT)
	- Pengembangan kawasan permukiman pendukung kawasan smelter terintegrasi tambang sorowako
Kawasan Smelter Terintegrasi (Tambang Sorowako)	- rekomendasi keprospekkan sumberdaya mineral
	- kebijakan rencana produksi dan pemanfaatan mineral logam dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri
	- tingkat implementasi P3DN dan peningkatan TKDN pada subsektor pertambangan mineral
	- hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri
	- Penurunan emisi gas rumah kaca
	- pengkajian kebutuhan standar industri hijau
	- penerapan transisi energi dan nilai ekonomi karbon
	- sertifikasi industri hijau
	- Fasilitas industri pengolahan sisa hasil produksi
	- Kebijakan penguatan industri logam berbasis nikel
	- Hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri, industri smelter/pemurnian/pengeolahan nikel/hidrometalurgi termonitor dan terevaluasi
- Fasilitas industri pengolahan sisa hasil produksi smelter lokal	

Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan Sekitarnya	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru dikawasan teluk Bone dan sekitarnya dengan output:
	- alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perternakan
	- alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan
	- alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan
	- alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura
	;- Desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan
	- Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan
	- Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila, dan rumput laut
	- Pengembangan kewirausahaan
Kawasan Transmigrasi	Pengembangan kawasan transmigrasi Mahalona melalui fasilitasi pengurusan sertifikast hal milik atas tanah transmigrasi, pemberian bantuan sarana produksi pertanian dan pengembangan jalan di kawasan transmigrasi
Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya	Pemerataan Kawasan di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya dengan output :
	4.2.2 Penguatan Kapasitas Daerah dalam Manajemen Layanan SPALD
	4.2.3 Pemenuhan akses listrik pada masyarakat
	4.2.4 Pemenuhan akses listrik pada masyarakat
	4.2.5 Pembangunan/peingkatan/ perluasan SPAM
	4.2.6 Penyediaan perumahan
	4.2.7 Siistem pengelolaan persampahan skala kota
	4.2.8 Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi

3.1.3.1 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 di tetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana berikut:

1. Peningkatan akses dan layanan Pendidikan yang berbasis akhlak dan kompetensi;
2. Peningkatan layanan keagamaan, Pepemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal;
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
4. Peningkatan ekonomi dan fiscal daerah yang modern dan berdaya saing;
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi Masyarakat, perdesaaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan;
6. Transformasi digital dan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, adaktif, dan melayani berbasis digital;
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, inestasi padat karya dan berwawasan lingkungan;
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

3.1.3.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, dan politik. Proses perencanaan partisipatif, teknokratik dan politik merupakan hal yang sangat penting ketika usulan perencanaan dari Musrenbang RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 maupun Forum Khusus dengan penyelarasan dan sinkronisasi dengan pokok pikiran DPRD (aspirasi DPRD) dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai arahan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 juga disusun dengan menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Dalam perencanaan pembangunan perlu merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tema pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya,

penjabaran tema dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dari hulu ke hilir (dalam sebuah kegiatan). Tidak luput pula, perencanaan pembangunan juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti Perangkat Daerah maupun stakeholder non Perangkat Daerah dalam sebuah sinergi untuk pelaksanaan perencanaan prioritas pembangunan. Tersedianya lokasi dari prioritas pembangunan tersebut juga harus jelas dengan menerapkan kesatuan kewilayahan sehingga satu lokasi dengan lainnya saling berkaitan erat.

Oleh karena itu, pembangunan tahun 2026 ditujukan guna akselerasi penguatan infrastruktur dasar, ekonomi lokal dan pertumbuhan berbasis potensi wilayah, dengan prioritas sebagaimana berikut :

Tabel. 6

No.	Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan
1.	Peningkatan layanan dasar dan sumber daya manusia	Peningkatan kualitas layanan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya
2.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan perlindungan adaptif	Peningkatan unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional/internasional
3.	Pemantapan infrastruktur ekonomu dan akseibilitas antar wilayah dengan fokus pada pengembangan Kawasan strategis kabupaten	Meningkatkan produktifitas sektor-sektor ekonomi yang potensial, Mendorong diversifikasi ekonomi
4.	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif dan inovatif berbasis digital	Peningkatan kualitas infrastruktur dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan
5.	Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan kondusifitas daerah	Peningkatan daya saing desa
6.	Pemantapan kondisi sosial masyarakat demi terjaganya stabilitas daerah	Peningkatan kondisi social, budaya dan agama

Sumber : Bapelrida Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, data diolah

1. Keselarasan dan keterkaitan dengan Prioritas Nasional (PN) dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Timur serta Program Prioritas OPD Tahun 2026

Table. 7

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.	Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Penguatan pendidikan berkualitas dan inklusif	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan untuk semua		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, RSUD I Lagaligo dan Seluruh Puskesmas
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan Dan RSUD I Lagaligo
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Seluruh Puskesmas				
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang	Menjamin Stabilitas Sosial, Politik dan Keamanan yang kondusif	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	
	inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marginal		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		Pengembangan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		Perlindungan Sosial yang Adaptif		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
				Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
				Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital,	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pertanian Maju dan Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.				
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN Dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
			Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
			Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Program Hubungan Industrial	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Perizinan Penggunaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
				Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Seluruh Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan	Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Infrastruktur Merata dan Berkualitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengelolaan Tanah Kosong	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
				dan Pertanahan
			Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lla)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Penerbangan	Dinas Perhubungan
			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
	Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pariwisata Maju dan Pelestarian Budaya Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Sumber: Bapperida Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, data diolah

2. Konsistensi dengan permasalahan/isu strategis

Tabel. 8

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi
1	Masih tingginya angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Akses dan kualitas Pendidikan Kesenjangan akses dan layanan Kesehatan 	(1) Pemantapan kualitas pelayanan dasar	Peningkatan kemampuan literasi masyarakat	Mendorong kontribusi dunia usaha, kesadaran kritis kolektif, dan dukungan sarana/prasarana dalam meningkatkan derajat pendidikan dan literasi, lama hidup dan kesehatan, serta daya beli masyarakat (St1)
	pendataan PPKS belum optimal			Pencegahan dan penanganan stunting secara integrative	Mengoptimalkan pemanfaatan dana dan koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi desa dalam kerangka pemenuhan SDGs Desa (St2)
	Masih Tingginya angka stunting			Penguatan daya beli masyarakat atas bahan pokok dan penting	Menguatkan Peran dan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan (St3)
	Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal				
	masih adanya pengangguran				
2	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kapasitas SDM yang berdaya saing Kebijakan investasi yang kurang mendukung Kurangnya kemitraan dengan pelaku usaha 	Daya saing industri	(3) Peningkatan kualitas ekonomi daerah berbasis sector pertanian, pariwisata dan UMKM (5) Peningkatan daya Saing Desa	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penerapan inovasi dalam peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan Pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi produk SDA Pengembangan sarana/prasarana ibadah Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata dan sektor jasa lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Memfaatkan teknologi terkini dan spirit milenial dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dengan didukung oleh inovasi daerah dan prasarana/sarana perdagangan (St4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perkembangan start-up UMKM berbasis digital yang didukung oleh iklim investasi dan persaingan usaha yang baik (St5)
3	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas jalan yang belum merata Minimnya akses internet Jaringan air bersih yang belum optimal 	Pemerataan Infrastruktur dan Jaringan Prasarana	(3) Peningkatan kualitas ekonomi daerah berbasis sector pertanian, pariwisata	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan darat, danau, sungai dan laut	Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam menjaga dan memelihara fungsi infrastruktur pekerjaan umum, perhubungan, pemukiman dan perumahan,

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi
			dan UMKM (5) Peningkatan daya Saing Desa		serta sumberdaya air secara berkualitas diiringi dengan kepatuhan terhadap RTRW (St6)
4	Deforestasi	Pengelolaan Limbah dan Sanitasi	(4)Pemantapan kualitas infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (3) Pemantapan Kualitas Ketahanan Desa	Pengelolaan sampah secara terpadu berbasis reduce, reuse dan recicle	Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis kontribusi multi pemangku kepentingan diiringi dengan peningkatan kapasitas dalam adaptasi dan mitigasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (St7)
	Tingginya curah hujan mengakibatkan banjir			Pengelolaan cagar budaya secara terpadu	
	Kurangnya fasilitas pengelolaan limbah yang memadai			Pembinaan sejarah daerah	
5	Kurangnya inovasi pelayanan publik	Transformasi Tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik	(2) Akselerasi tata kelola pelayanan publik yang inovatif	Perbaikan pelayanan penanaman modal	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 5meningkatkan akuntabilitas kinerja dan perbaikan tata kelola keungan daerah diiringi dengan peningkatan profesionalisme SDM aparatur berbasis jabatan fungsional (St8)
	Digitalisasi layanan pemerintahan yang belum optimal			Optimalisasi perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayan bagi fungsi perangkat daerah	Meningkatkan akurasi data, kesiapan sarana dan fasilitas, serta kesiapan SDM aparatur diiringi dengan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi serta standar operasional prosedur dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar dan perbaikan kualitas pelayanan non SPM (St9)
	Sumber daya manusia aparatur yang belum memadai			Modernisasi sistem pengelolaan arsip	
	Malpraktek administrasi			Percepatan pelayanan pada perangkat daerah teknis untuk layanan perizinan dan non perizinan	
6	Kurangnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	Kesetaraan Gender	(6) Pemantapan kondisi social masyarakat demi terjaganya stabilitas daerah	Penghayatan dan pengamalan kesatuan berbangsa dan bernegara	Menguatkan peran kelembagaan masyarakat secara bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta rasa aman dan damai dalam masyarakat (St10) Memperkuat peran forum kerukunan umat beraagama serta pembinaan mental-spiritual diiringi dengan penguatan modal keragaman etnik dan suku dalam pemajuan kebudayaan (St11)
	Kesempatan perempuan untuk berkarir di segala bidang masih terbatas			Penguatan ketahanan ekologi desa	
	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan			Pengembangan teknologi tepat guna Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	
				Pengembangan sarana/prasarana ibadah	

Sumber: Bapperida Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Luwu Timur dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun
2026

Tabel. 9

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Pokok-pokok Pikiran DPRD
1	Akses dan Kualitas pendidikan	(1) Pematapan kualitas pelayanan dasar	1. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan
			2. pendataan pelajar dan mahasiswa
2	Daya Saing Industri	(5) menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan	4. Percepatan pembangunan sarana perhubungan udara, pelabuhan jaringan listrik, transportasi dan komunikasi
			5. Menggali potensi sumber-sumber PAD
3	Kesenjangan infrastruktur dan kualitas layanan	(3) Peningkatan kualitas ekonomi daerah berbasis sektor pertanian pariwisata dan UMKM	6. Percepatan pembangunan infrastruktur jembatan, sarana irigasi, pendukung pertanian, jalan tani, jaringan air bersih
			7. Menjaga stabilitas harga bahan pokok
			8. penindakan dan penertiban BBM dan pupuk ilegal
4	Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	(6) mengoptimalkan Sumber daya lokal dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi	9. Pencegahan dan pembangunan pasca bencana
			10. pencegahan kerusakan lingkungan
			11. Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tambang
5	Tata kelola pemerintahan	(2) tata Kelola Pelayanan Publik yang inovatif	12. Peningkatan kualitas pelayanan publik
6	Daya Saing Industri	(6) mengoptimalkan Sumber daya lokal dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi	13. Penataan pengelolaan pemerintahan desa
			14. Pembenahan sistem administrasi dan aset pemerintah daerah
			15. Peningkatan sarana ibadah

sumber: Bapperida Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

3.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan

3.1.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan

Arah kebijakan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai upaya pencapaian visi dan agenda prioritas pembangunan nasional, yang mencakup upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang Maju, sejahtera, adil dan berdaulat. .

Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026, Adapun Bidang Urusan terkait Penanggulangan Bencana yaitu “**Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**”, dengan arah kebijakan pembangunan daerah yaitu “**Pemenuhan Manajemen Bencana Yang Terintegrasi,** ”, yaitu Asta Cita “**Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis Dengan Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur**”.

3.1.3.5 Kesepakatan RAKORTEKBANG NASIONAL Tahun 2025

NO (1)	ASTA CITA (2)	KODE BIDANG (3)	BIDANG URUSAN (4)	OUTCOME PRIORITAS (5)	KODE PROGRAM (6)	PROGRAM (7)	KODE SUB KEGIATAN (8)	SUB KEGIATAN (9)
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027 1.05.03.2.04.0005	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Timur.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah :

1. Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah
2. Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik

1.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Penggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 adalah:

1. Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
2. Meningkatnya penyelenggaraan SPM Sub Urusan Bencana
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel. 10
Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.	Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,66 (sedang)
			Meningkatnya penyelenggaraan SPM Sub Urusan Bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,42 (BB)

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya serta mengakomodir usulan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah direncanakan, maka pada tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merencanakan 2 program dengan 12 kegiatan, dan 48 Sub Kegiatan yang terdiri dari 1 program utama dengan 4 kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan 1 program pendukung dengan 8 kegiatan yang menunjang tugas kesekretariatan agar fungsi organisasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

3.1.1 Program Utama

1. Program Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Kontijensi
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :
 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana :
- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota
 - Bimbingan teknis pasca bencana kabupaten/kota
 - Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana kabupaten/kota
 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kab/kota
 - Penyusunan kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kab/kota

3.1.2 Program Pendukung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
- Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tabel. 11 (TC.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						5.172.606.050,00								6.434.907.996,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.172.606.050,00								6.434.907.996,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						5.172.606.050,00								6.434.907.996,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %			100 %	4.037.690.550,00						100 %	5.261.379.546,00		
		[Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi]	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar	100	92.92	100	100	4.037.690.550,00	-	-	-	-	-	-	5.261.379.546,00	-	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%			100 %	111.510.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin- gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningka- tan Tata Kelola per- yenggaran pemerinta- han yang akuntabel dan inovatif 4. Peningka- tan Tata Kelola Pem- erintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	100%	161.410.650,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen			2 Dokumen	33.083.700,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraan pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	2 Dokumen	34.737.850,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	4.690.500,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraan pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	2 Dokumen	49.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	-	-	-	-	-	4.037.690.550,00	-	-	-	-	-	-	5.261.379.546,00	-
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	10 Dokumen			2 Dokumen	4.332.700,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeleraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	2 Dokumen	4.549.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi]	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar	100	92.92	100	100	4.037.690.550,00	-	-	-	-	-	-	5.261.379.546,00	-
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	50 Laporan			10 Laporan	69.403.400,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeleraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	10 Laporan	72.873.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik</i>	100%			100 %	2.928.381.066,00			Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN dan Laporan Keuangan OPD	100%	4.154.904.646,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	43 Orang/bulan			47 Orang/bulan	2.873.307.966,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN dan Laporan Keuangan OPD	43 Orang/bulan	4.097.077.896,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	90 Laporan			18 Laporan	55.073.100,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN dan Laporan Keuangan OPD	18 Laporan	57.826.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100%			100 %	21.360.100,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	Barang Milik Daerah (BMD)	100%	22.428.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	5 Laporan			4 Laporan	21.360.100,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	Barang Milik Daerah (BMD)	1 Laporan	22.428.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%			100 %	80.701.000,00			Memperkuat penyelaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN, PPPK & Upah Jasa	100%	86.951.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	172 Paket			48 Paket	36.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN, PPPK & Upah Jasa	43 Paket	38.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	70 Orang			12 Orang	44.501.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN, PPPK & Upah Jasa	15 Orang	48.951.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah</i>	100%			100 %	389.775.600,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelaras an pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN dan Penunjang administrasi umum perkantoran	100%	416.947.050,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	40 Paket			8 Paket	14.213.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelaras an pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN dan Penunjang administrasi umum perkantoran	8 Paket	14.213.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	100 Paket			20 Paket	31.240.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola perencanaan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN dan Penunjang administrasi umum perkantoran	20 Paket	31.240.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	15 Paket			3 Paket	34.085.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola perencanaan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN dan Penunjang administrasi umum perkantoran	3 Paket	35.789.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	300 Dokumen			60 Dokumen	7.440.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN dan Penunjang administrasi umum perkantoran	60 Dokumen	7.440.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	5 Laporan			1 Laporan	15.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN dan Penunjang administrasi umum perkantoran	1 Laporan	18.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan			1 Laporan	287.397.600,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN dan Penunjang administrasi umum perkantoran	1 Laporan	309.564.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD - PD penunjang yang terpenuhi	100%			100 %	142.610.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN dan Perlengkapan Kantor	100%	140.998.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit			18 Unit	33.850.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN dan Perlengkapan Kantor	5 Unit	27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	63 Unit			7 Unit	84.760.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	88.998.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	23 Unit			3 Unit	24.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelarasn pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN dan Perlengkapan Kantor	5 Unit	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%			100 %	97.782.484,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelarasn pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN, Upah Jasa dan Kantor BPBD	100%	100.552.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	5 Laporan			1 Laporan	4.415.800,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN, Upah Jasa dan Kantor BPBD	1 Laporan	4.636.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	5 Laporan			1 Laporan	67.806.684,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN, Upah Jasa dan Kantor BPBD	1 Laporan	67.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	5 Laporan			1 Laporan	25.560.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	ASN, Upah Jasa dan Kantor BPBD	1 Laporan	28.116.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</i>	100%			100 %	265.570.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	Kantor BPBD dan Peralatan Kantor	100%	177.187.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	19 Unit			14 Unit	127.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	Kantor BPBD dan Peralatan Kantor	18 Unit	127.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	175 Unit			37 Unit	28.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	Kantor BPBD dan Peralatan Kantor	35 Unit	30.187.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit			2 Unit	109.820.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif Berbasis Digital	Kantor BPBD dan Peralatan Kantor	3 Unit	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<i>Persentase warganegara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</i>	100 %			100 %	1.134.915.500,00						100 %	1.173.528.450,00	
		[Meningkatkan kesadaran masyarakat, pengurangan jumlah korban jiwa dan kerugian ekonomi, serta pemulihan yang lebih cepat dan efektif setelah terjadinya bencana]	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	100	1.134.915.500,00	-	-	-	-	-	-	1.173.528.450,00	-
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Cakupan warganegara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</i>	100%			0,08 %	37.422.400,00			Memperkuat penyelaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	100%	39.293.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun</i>	1250 Orang			250 Orang	37.422.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	250 Orang	39.293.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</i>	100%			100 %	480.512.100,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	100%	479.396.675,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>	275 Unit			79 Unit	30.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	50 Unit	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			<i>Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota</i>	2250 Orang			250 Orang	27.331.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	500 Orang	28.698.075,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>	200 Keluarga			50 Keluarga	16.611.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	50 Keluarga	17.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0020		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			<i>Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>	5 Kawasan			4 Kawasan	59.433.900,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	5 Kawasan	62.405.550,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0021		Pembangunan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>	250 Orang			50 Orang	43.751.500,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningka tan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	50 Orang	45.939.050,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0022		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	5 Dokumen			2 Dokumen	182.262.200,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningka tan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0023		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen			1 Dokumen	56.042.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	1 Dokumen	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0026		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	5 laporan			1 laporan	16.849.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	1 laporan	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0028		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	5 Kawasan			1 Kawasan	47.480.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Warganegara yang berada di daerah rawan bencana	1 Kawasan	49.854.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender</i>	100%			100 %	411.986.800,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara korban bencana	100%	431.522.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas</i>	4 Laporan			1 Laporan	22.041.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara korban bencana	1 Laporan	23.143.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>	5 Dokumen			1 Dokumen	231.203.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara korban bencana	1 Dokumen	242.763.150,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>	500 Orang			550 Orang	38.525.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara korban bencana	100 Orang	40.451.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0007		Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal</i>	4 Dokumen			1 Dokumen	24.822.700,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara korban bencana	1 Dokumen	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	4750 Orang			550 Orang	52.908.700,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara korban bencana	1000 Orang	55.554.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit														
			<i>Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu</i>	5 Dokumen			1 Dokumen	22.041.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara korban bencana	1 Dokumen	23.143.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>	5 Laporan			1 Laporan	20.445.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara korban bencana	1 Laporan	21.467.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	<i>Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan</i>	100%			100 %	204.994.200,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara yang berada di daerah rawan bencana dan korban bencana	100%	223.316.075,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah</i>	8 Dokumen			3 Dokumen	16.126.200,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningka tan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara yang berada di daerah rawan bencana dan korban bencana	2 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i>	4 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningka tan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningka tan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara yang berada di daerah rawan bencana dan korban bencana	1 Dokumen	22.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	240 Orang			25 Orang	29.995.500,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara yang berada di daerah rawan bencana dan korban bencana	60 Orang	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0010		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	5 Kegiatan			1 Kegiatan	49.822.300,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara yang berada di daerah rawan bencana dan korban bencana	1 Kegiatan	52.313.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0011		Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	5 Lembaga			1 Lembaga	19.995.700,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara yang berada di daerah rawan bencana dan korban bencana	5 Lembaga	20.995.450,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota														
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	4 Laporan			1 Laporan	19.996.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara yang berada di daerah rawan bencana dan korban bencana	1 Laporan	20.995.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen			1 Dokumen	49.058.500,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 1. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia	Warganegara yang berada di daerah rawan bencana dan korban bencana	1 Dokumen	51.511.425,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
J U M L A H															5.172.606.050,00	6.434.907.996,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah merencanakan 2 program, 12 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 5.172.606.050,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 12
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									4.037.690.550
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									111.510.300
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	2 Dokumen	100%	33.083.700	PAD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	2 Dokumen	100%	4.690.500	PAD
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	2 Dokumen	100%	4.332.700	PAD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	10 Laporan	100%	69.403.400	PAD
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2.928.381.066
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	22 Orang	100%	2.873.307.966	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	18 Laporan	100%	55.073.100	PAD
III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									21.360.100	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	4 Laporan	100%	21.360.100	PAD
IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									80.701.000	
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	43 Paket	100%	36.200.000	PAD
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	10 orang	100%	44.501.000	PAD
V Administrasi Umum Perangkat Daerah									389.775.600	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	8 Paket	100%	14.213.000	PAD
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	20 Paket	100%	31.240.000	PAD
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	3 Paket	100%	34.085.000	PAD
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	60 Dokumen	100%	7.440.000	PAD
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	1 Laporan	100%	15.400.000	PAD
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	1 Laporan	100%	287.397.600	PAD

VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								142.610.000	
16	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	15 Unit	100%	33.850.000	PAD
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	7 unit	100%	84.760.000	PAD
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	4 unit	100%	24.000.000	PAD
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								97.782.484	
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	1 Laporan	100%	4.415.800	PAD
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	1 Laporan	100%	67.806.684	PAD
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	1 Laporan	100%	25.560.000	PAD
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								265.570.000	
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	14 unit	100%	127.000.000	PAD
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	34 unit	100%	28.750.000	PAD
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	3 unit	100%	109.820.000	PAD
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								1.134.915.500	
IX	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								37.422.400	

25	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	250 Orang	0,08%	37.422.400	PAD
X	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								480.512.100	
26	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	75 Unit	100%	30.750.000	PAD
27	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	50 Keluarga	100%	16.611.500	PAD
28	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	1 Dokumen	100%	56.042.000	PAD
29	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	1 Kawasan	100%	47.480.000	PAD
30	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	1 Laporan	100%	16.849.500	PAD

31	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	4 Kawasan	100%	59.433.900	PAD
32	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kec/Desa	100%	50 Orang	100%	43.751.500	PAD
33	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	2 Dokumen	100%	182.262.200	PAD
34	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	250 Orang	100%	27.331.500	PAD
XI	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								411.986.800	
35	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	1 Laporan	100%	22.041.200	PAD
36	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	1 Dokumen	100%	231.203.000	PAD

37	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	750 Orang	100%	38.525.000	PAD
38	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	1 Dokumen	100%	24.822.700	PAD
39	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	750 orang	100%	52.908.700	PAD
40	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	1 Laporan	100%	20.445.000	PAD
41	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/Wabah Penyakit	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	1 Dokumen	100%	22.041.200	PAD
XII	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								204.994.200	
42	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	3 Dokumen	100%	16.126.200	PAD
43	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	1 Dokumen	100%	20.000.000	PAD

44	Bimbingan teknis pasca bencana kabupaten/kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	25 Orang	100%	29.995.500	PAD
45	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	1 Dokumen	100%	49.822.300	PAD
46	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana kabupaten/kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	1 Lembaga	100%	19.995.700	PAD
47	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kab/kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab.Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semual kel/Desa	100%	1 Laporan	100%	19.996.000	PAD
48	Penyusunan kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kab/kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	1 Lembaga	100%	49.058.500	PAD
TOTAL									5.172.606.050	

BAB IV PENUTUP

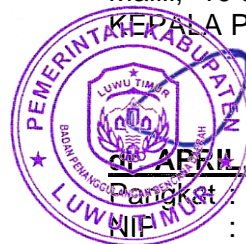
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2026, sehingga upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, berkelanjutan dan bersinergi dengan OPD yang membidangi fungsi lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Malili, 10 Juli 2025

KEPALA PELAKSANA,



DR. APRIL M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

: 19670707 200012 1 002